

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran Antara Ambisi Besar, Tantangan Tata Kelola, dan Kontestasi Demokratis

Satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran ditandai oleh narasi besar mengenai “fondasi kuat” menuju Indonesia Emas 2045, namun klaim tersebut perlu dibaca secara kritis. Pemerintah memang menonjolkan stabilitas ekonomi makro pertumbuhan sekitar 5 persen, inflasi terkendali, serta defisit APBN yang relatif aman. Secara permukaan, indikator ini menunjukkan kesinambungan dari pemerintahan sebelumnya. Namun stabilitas makro tidak serta-merta mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang merata, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Perbaikan statistik ekonomi juga perlu diuji secara independen untuk memastikan tidak terjadi bias narasi dari pemerintah.

Program-program sosial yang diklaim menjadi terobosan, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan layanan pendidikan, memang ambisius dan berskala besar. Namun pelaksanaannya masih menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan fiskal, efektivitas penyaluran, serta potensi pemangkasan anggaran sektor lain demi menutup biaya operasional program ini. Sebagai contoh, kritik publik terkait realokasi anggaran dari pendidikan tinggi menuju pembiayaan program sosial menandakan bahwa kebijakan yang terlalu populis dapat mengorbankan kebutuhan jangka panjang bangsa. Tanpa mekanisme evaluasi yang transparan, program besar berisiko menjadi beban anggaran di masa depan.

Di sisi tata kelola, satu tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan meningkatnya peran aparat keamanan dan militer dalam urusan sipil, termasuk distribusi bantuan sosial maupun pendampingan program pemerintah. Meskipun pemerintah menilai hal ini sebagai upaya mempercepat layanan publik, dari sudut pandang demokrasi hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran tentang menurunnya kontrol sipil dan potensi mengaburnya batas antara fungsi militer dan pemerintahan sipil. Penguatan lembaga pengawas menjadi penting untuk memastikan bahwa akuntabilitas tetap terjaga dan tidak terjadi konsolidasi kekuasaan yang berlebihan di tangan eksekutif.

Dari sisi sosial-politik, tingkat kepuasan publik yang diklaim tinggi tidak sepenuhnya menggambarkan konsensus nasional. Sejumlah kelompok mahasiswa, serikat masyarakat sipil, dan akademisi menunjukkan resistensi terhadap beberapa arah kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu elitis, kurang partisipatif, atau tidak transparan. Protes dan kritik ini menunjukkan bahwa legitimasi tidak hanya diukur dari survei, tetapi juga dari kualitas dialog antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini menandakan belum sepenuhnya tercapai harmoni antara agenda pemerintah yang berskala besar dan kebutuhan warga untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran menghadirkan potret campuran antara ambisi besar dan tantangan fundamental. Di satu sisi terdapat upaya memperluas

jangkauan program sosial dan pembangunan nasional; di sisi lain terdapat persoalan transparansi, tata kelola, keberlanjutan fiskal, dan partisipasi publik yang masih membutuhkan perhatian serius. Evaluasi kritis menjadi penting agar pemerintahan tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga bergerak tepat—berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan, menghormati prinsip demokrasi, dan menempatkan keberlanjutan jangka panjang di atas kepentingan politis jangka pendek.